

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan terjadi ketika seseorang atau kelompok tidak dapat mencapai tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimum untuk standar hidup tertentu. Kemiskinan lahir dengan keterbatasan orang-orang tertentu dalam memenuhi kebutuhannya. Kemiskinan merupakan masalah yang paling kompleks di dunia, terutama di negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar seperti Indonesia. Namun nyatanya, beberapa negara maju telah mampu mengentaskan kemiskinan sedikit demi sedikit. Tentunya tidak semua orang dapat sejahtera dalam hidup ini, dengan banyaknya permasalahan demi permasalahan yang terjadi.

Kemiskinan yang terjadi di negara berkembang merupakan masalah yang cukup rumit, namun di beberapa negara berkembang telah mencapai keberhasilan dalam hal produksi dan pendapatan nasional. Kondisi kemiskinan suatu negara atau daerah merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggal pada negara atau daerah tersebut (Christianto, 2003). Indonesia merupakan negara yang masih digolongkan berkembang dimana kemiskinan masih menjadi pusat perhatian sebagai masalah.

Para ahli ekonomi menilai pertumbuhan ekonomi saat ini tidak secara signifikan menurunkan angka kemiskinan. Beberapa negara berkembang dengan tingkat perekonomian yang baik masih mengalami tingkat kemiskinan dan

pengangguran yang tinggi. Oleh karena itu, muncul teori baru seperti New-keynesian yang secara umum berpendapat bahwa pertumbuhan tidak akan bermanfaat secara optimal jika tidak disertai dengan pemerataan pendapatan tersebut.

Pemerintah Indonesia sangat menyadari salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja perekonomian adalah dengan cara melakukan pembangunan nasional agar mampu menciptakan lapangan pekerjaan di daerah – daerah dan menata kehidupan yang layak demi mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia secara merata. Di Negara Indonesia masih terjadinya kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan. Sasaran pembangunan nasional telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan pendek. Salah satu indikator utama dalam kebijakan nasional adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin (Dermoredjo, 2003).

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan virus pneumonia yang menyebar di seluruh dunia menjadi alasan meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Bogor. Kondisi tersebut menjadi salah satu sasaran *refocusing* anggaran di sektor pemulihan ekonomi yang akan dilakukan pemerintah Kabupaten Bogor. Dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) 2020, pemerintah Kabupaten Bogor menegaskan prioritas pembangunan adalah pemulihan ekonomi dan pelayanan nasional dengan banyak indikator di dalamnya.

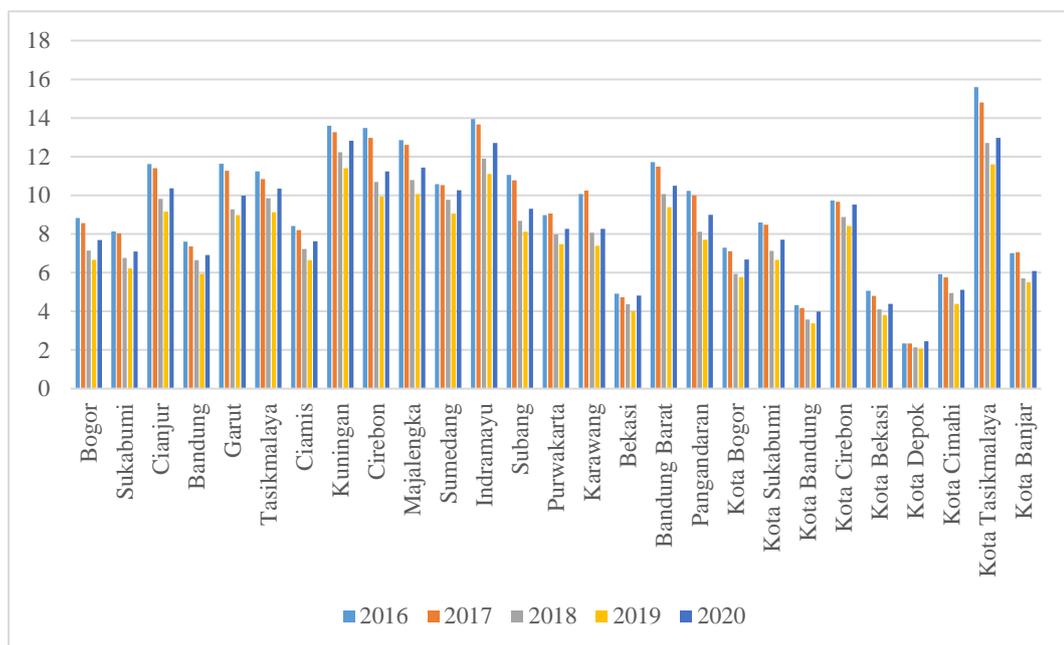
Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur terpilih serta menjadi

dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi.

Target indikator kinerja tujuan dan sasaran Tahun 2020 sampai dengan 2023 mengalami penyesuaian. Penyesuaian target tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 merupakan bagian dari upaya pencapaian target indikator makro pembangunan daerah. Indikator makro Provinsi Jawa Barat ditetapkan dengan mempertimbangkan dukungan terhadap pencapaian target indikator makro nasional dan kemampuan Provinsi Jawa Barat dengan adanya pandemi COVID-19. Penentuan proyeksi indikator makro telah melibatkan pemangku kepentingan terkait serta para pakar dan akademisi. Perhitungan proyeksi tersebut mempertimbangkan teori serta data masa lalu capaian pembangunan Jawa Barat berdasarkan publikasi BPS.

Arah kebijakan pembangunan seluruh kabupaten dan kota di bawah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat mendukung pencapaian lima indikator kinerja makro Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari: indeks pembangunan manusia, persentase kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, laju pertumbuhan ekonomi dan indeks gini rasio. Salah satu latar belakang Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yakni adanya pandemi COVID-19 yang berdampak luas terhadap berbagai dimensi kehidupan dan pembangunan, terlebih pada aspek sosial dan ekonomi. Ditinjau dari dimensi ekonomi, dampak pandemi ditandai antara lain dengan perlambatan konsumsi

masyarakat, penurunan investasi, penurunan output di berbagai sektor terutama manufaktur, konstruksi dan jasa. Pada dimensi sosial terjadi penurunan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan angka kematian, peningkatan angka kemiskinan, dan peningkatan angka pengangguran. Adapun target meningkatnya upaya penanggulangan kemiskinan dengan kondisi akhir persentase kemiskinan 6,80%.



Gambar 1.1 Tingkat Kemiskinan Seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020 (%)

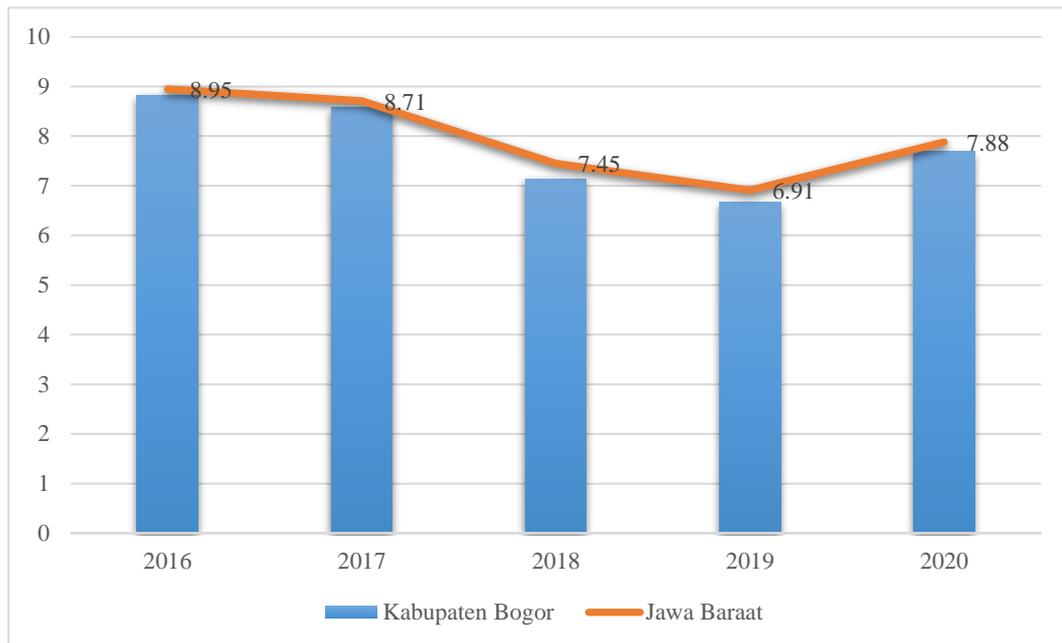
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, diolah kembali

Berdasarkan gambar 1.1 tingkat kemiskinan seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016 sampai 2019 mengalami kecenderungan menurun, pada tahun 2020 mengalami kenaikan. Persentase tingkat kemiskinan Kabupaten Bogor masih terbilang tinggi dari kabupaten dan kota yang karakteristiknya sama seperti Kabupaten Bekasi yang masih lebih rendah dari Kabupaten Bogor.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor tahun 2018-2023 merupakan tahap keempat dari keseluruhan tahapan yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor tahun 2005-2025. Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD tahap ketiga, RPJMD tahap keempat ini ditujukan untuk merealisasikan visi dan misi pembangunan daerah melalui optimalisasi seluruh urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bogor yaitu meningkatnya upaya penanggulangan kemiskinan dengan kondisi akhir persentase kemiskinan 6,38%

Menurut Bappeda dan BPS Kab. Bogor (2014), kemiskinan dan penanggulangannya telah menjadi prioritas pembangunan dan menjadi agenda pokok yang mengerahkan berbagai sumber daya pembangunan. Pada tingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah (Pemda) telah menargetkan penurunan jumlah penduduk miskin setiap tahunnya. Penurunan jumlah penduduk miskin menjadi prioritas di beberapa pemerintah daerah untuk menekan laju dari angka kemiskinan yang terus bergerak seiring dengan laju pertumbuhan penduduk.

Upaya yang dilakukan yaitu melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan. Berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah maupun Pemda yaitu mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat serta program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha kecil



Gambar 1.2 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020 (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, diolah kembali

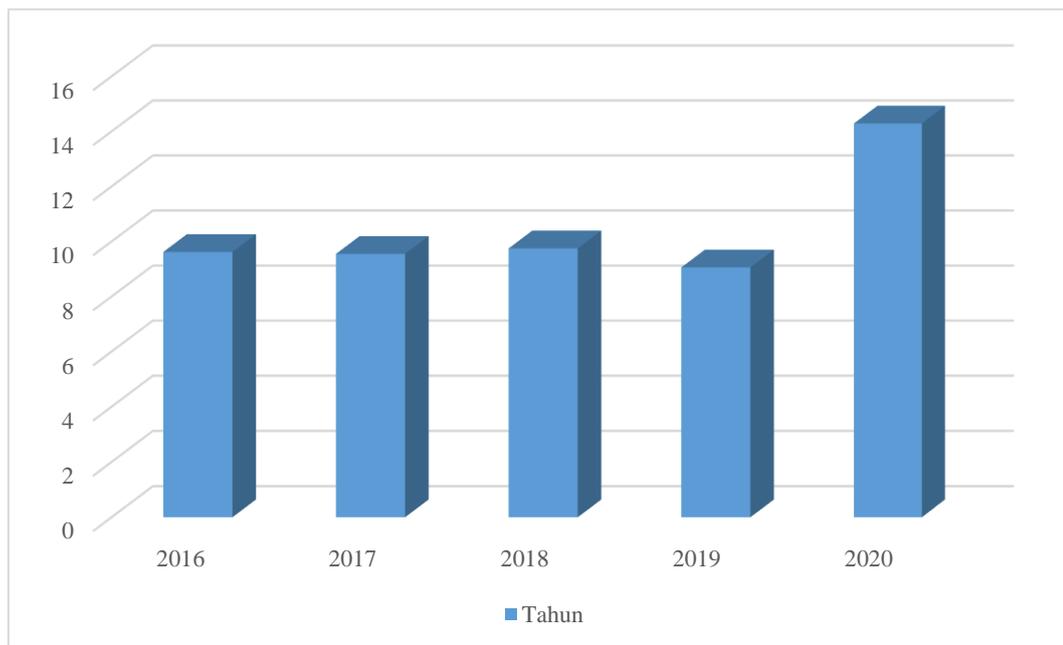
Berdasarkan gambar 1.2 tingkat kemiskinan di Kabupaten Bogor pada tahun 2016 sampai 2019 mengalami kecenderungan menurun, pada tahun 2020 mengalami kenaikan. Pada periode tahun 2016 tingkat kemiskinan sebesar 8,83 persen. Periode 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 0,26 persen. Pada periode 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan juga sebesar 1,43 persen. Pada periode 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan juga sebesar 0,48 persen. Pada periode 2019 ke tahun 2020 mengalami kenaikan 1,03 persen. Dilihat dari tabel tersebut tingkat kemiskinan di Kabupaten Bogor terlihat hampir sama dengan keadaan di Provinsi Jawa Barat.

Usaha pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan sangatlah serius. Upaya pemerintah daerah Kabupaten Bogor untuk mengatasi kemiskinan di dalam pandemi COVID-19. Pemerintah mengeluarkan enam kebijakan demi memulihkan

sektor ekonomi masyarakat. Pertama memperluas daftar positif investasi, percepatan proses perizinan, serta keringanan dan relaksasi pajak daerah bagi dinas untuk penciptaan iklim usaha yang kondusif. Kedua pemberian bantuan permodalan kepada pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan industri kecil menengah serta mendukung percepatan pemulihan sektor lainnya seperti pangan dan pariwisata. Ketiga memberikan perlindungan kepada jenis – jenis usaha tertentu seperti sektor pertanian, perikanan, peternakan berupa peraturan daerah atau peraturan Bupati tentang perlindungan usaha. Keempat pengembangan promosi dan pemasaran digital. Kelima peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan daring. Keenam yaitu memantapkan sinergi dengan asosiasi atau forum atau himpunan dunia usaha.

Hubungan pengangguran dan kemiskinan sangat erat sekali, jika suatu masyarakat sudah bekerja pasti masyarakat atau orang tersebut berkecukupan atau kesejahteraannya tinggi, namun di dalam masyarakat ada juga yang belum bekerja atau menganggur, pengangguran secara otomatis juga akan mempengaruhi tingkat kemiskinan. Pengangguran merupakan kondisi seseorang tergolong angkatan kerja dan yang menginginkan pekerjaan tetapi belum memperoleh pekerjaan tersebut, Sukirno (1997). Faktor utama yang menyebabkan pengangguran adalah kurangnya pengeluaran agregat. Pengangguran terbuka terjadi karena tingkat pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat dan tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat. Tingginya tingkat pengangguran merupakan salah satu cerminan kurang berhasilnya pembangunan dalam suatu negara karena terjadinya ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah lapangan jumlah

lapangan kerja yang tersedia. Dalam sudut pandang makro ekonomi, pengangguran yang tinggi merupakan masalah. Salah satu gambaran dampak dari tingginya tingkat pengangguran adalah akan banyaknya sumber daya yang terbuang percuma dan pendapatan masyarakat berkurang. Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang tercipta sebagai akibat pertambahan lapangan kerja yang lebih rendah dari pertumbuhan tenaga kerja. Akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan.



Gambar 1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020 (%)

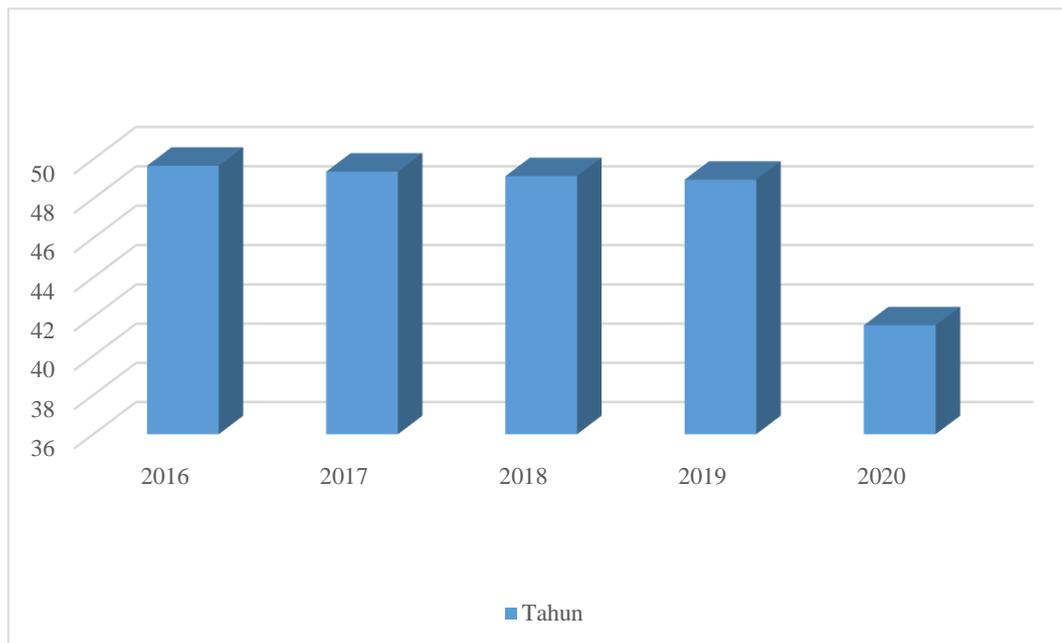
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, diolah kembali

Berdasarkan gambar 1.3 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bogor periode 2016 sampai 2020 tingkat pengangguran terbuka mengalami naik dan turun. Pada tahun 2016 tingkat pengangguran sebesar 9,62 persen. Pada periode 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 0,07 persen. Pada periode 2017 ke tahun 2018 mengalami kenaikan 0,20 persen. Pada periode 2018 ke tahun 2019

mengalami penurunan 0,69 persen. Pada periode 2019 ke tahun 2020 mengalami kenaikan 5,23 persen.

Dependency ratio ini dipicu dengan adanya jumlah kelahiran yang tinggi, sehingga penduduk yang berumur 0-14 tahun meningkat. Kenaikan ini tentunya membawa dampak bagi kependudukan di Kabupaten Bogor. Dalam beberapa penentuan kebijakan semakin banyak yang perlu dipertimbangkan baik dalam hal penyediaan berbagai sarana dan prasarana, fasilitas-fasilitas umum dan yang terpenting adalah kebijakan dalam rangka mengurangi laju pertumbuhan penduduk dan menurunkan angka beban tanggungan (*dependency ratio*) yang ada di Kabupaten Bogor. Sehingga muncul program Keluarga Berencana (KB) dan sekarang ditangani oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Rasio Ketergantungan merupakan perbandingan (rasio) antara jumlah penduduk usia non produktif (0-14 dan 65+ tahun) dengan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun). Semakin tinggi rasio ketergantungan menggambarkan semakin berat beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif karena harus mengeluarkan sebagian pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan penduduk usia non produktif dan sebaliknya. Secara kasar rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator ekonomi suatu negara dan apakah tergolong maju atau tidak. Rasio ketergantungan juga dapat menjadi indikator kemajuan ekonomi suatu wilayah.



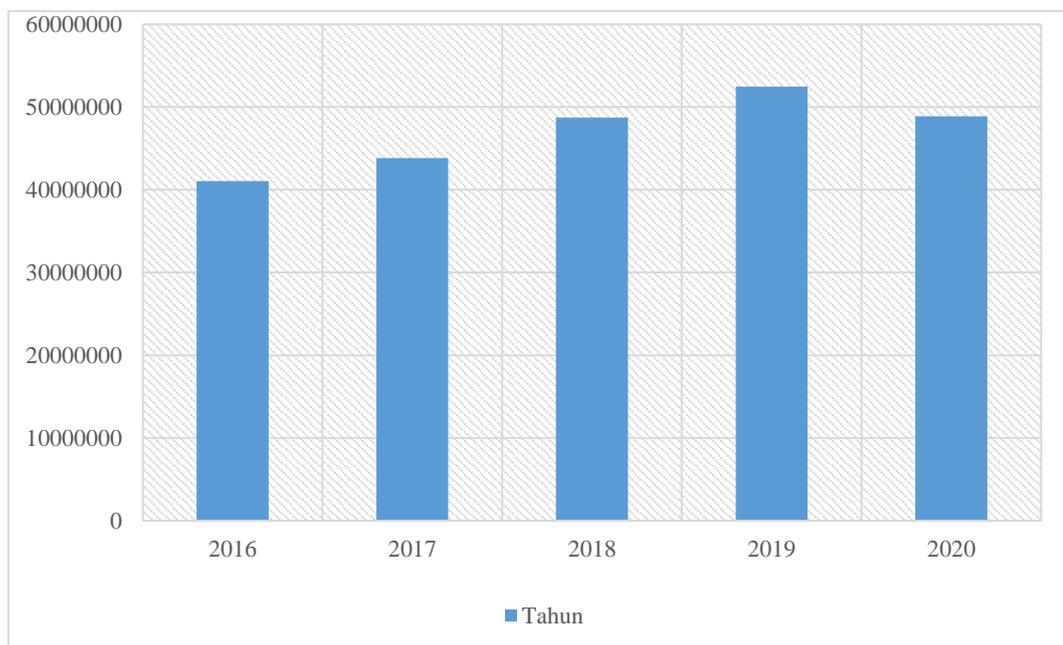
Gambar 1.4 Rasio Ketergantungan Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020 (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, diolah kembali

Berdasarkan gambar 1.4 rasio ketergantungan di Kabupaten Bogor pada tahun 2016 sampai 2020 mengalami penurunan. Pada periode tahun 2016 rasio ketergantungan sebesar 49,67 persen. Periode 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 03 persen. Pada periode 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan juga sebesar 0,23 persen. Pada periode 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan juga sebesar 0,18 persen. Pada periode 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan juga sebesar 7,4 persen.

Indonesia merupakan salah satu dari negara-negara ASEAN dan juga merupakan negara yang sedang berkembang yang melihat investasi sebagai sumber pembangunan ekonomi, modernisasi, pertumbuhan pendapatan, ketenagakerjaan, dan pengurangan kemiskinan yang perlu mendapatkan perhatian yang serius. Menurut Sunariyah (2003:4) “Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan

mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang.” Investasi yang lazim disebut juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Tabungan dari sektor rumah tangga melalui institusi keuangan akan mengalir ke sektor perusahaan. Apabila para pengusaha menggunakan uang tersebut untuk membeli barang-barang modal, pengeluaran tersebut dinamakan investasi.



Gambar 1.5 Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020 (Rp)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, diolah kembali

Berdasarkan gambar 1.5 pembentukan modal tetap bruto di Kabupaten Bogor pada tahun 2016-2020 mengalami kenaikan lalu penurunan, pada tahun 2016 investasi sebesar Rp41.062.662,4 pada tahun 2017 meningkat sebesar Rp2.765.615,1 lalu pada tahun 2018 meningkat lagi sebesar Rp4.925.179,4 lalu pada tahun 2019 meningkat kembali sebesar Rp3.734.316,1 lalu pada tahun 2020 menurun sebesar Rp3.604.373,2.

Berdasarkan latar belakang masalah di tersebut penulis mengambil judul penelitian **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bogor Tahun 2010-2020”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran, rasio ketergantungan dan investasi secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Bogor tahun 2010-2020?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran, rasio ketergantungan dan investasi secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Bogor tahun 2010-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh tingkat pengangguran, rasio ketergantungan dan investasi secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Bogor tahun 2010-2020.
2. Pengaruh tingkat pengangguran, rasio ketergantungan dan investasi secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Bogor tahun 2010-2020.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang telah diperoleh diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi instansi pembuat dan pengambil kebijakan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan perencanaan untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bogor.
2. Bagi pembaca dapat digunakan sebagai pengetahuan dan referensi penelitian selanjutnya.
3. Bagi penulis penelitian merupakan media untuk meningkatkan kemampuan analisis serta sebagai implementasi ilmu yang sudah didapat selama kuliah.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian bertempat di Kabupaten Bogor melalui data yang diperoleh dari *website* resmi Badan Pusat Statistik

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini diawali sejak bulan Mei 2021, diawali dengan pengajuan judul kepada pihak jurusan Ekonomi Pembangunan. Jadwal penelitian dapat dilihat di dalam tabel 1.1.

Tabel 1.1 Matriks Jadwal Penelitian

Keterangan	Tahun 2021																				
	Maret				April				Mei				Juni				Juli				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Pengajuan Judul	■																				
Pengumpulan Data		■																			
Penyusunan UP dan Bimbingan Penelitian									■												
Seminar Usulan Penelitian																	■				
Pengolahan Data																					
Keterangan	Agustus				September				Oktober				November				Desember				
Penyusunan Skripsi dan Bimbingan	■				■				■												
Ujian Skripsi dan Komprehensif																					
Revisi																	■				

